



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA BAPPEDA KOTA PADANG

LAPORAN MAGANG



**NISRINA OKTAVIA
06 052 034**

**PROGRAM DIPLOMA III
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2009**



PEMERINTAH KOTA PADANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jalan Prof. H. M. Yamin, SH. No. 70 Telp. (0751) 20797 - 27813, KP. 25111 Padang

SURAT KETERANGAN
Nomor : 810.250/S.Ket.Bappeda-V/2009

Yang bertandatangan dibawah ini, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NISRINA OKTAVIA
No. BP. : 06.052.034
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Univ. Andalas (Program Diploma III)

Telah melaksanakan *magang* pada Kantor Bappeda Kota Padang tanggal 23 Maret s/d 15 Mei 2009 . Dimana selama melaksanakan kegiatan magang yang bersangkutan telah melaksanakannya dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

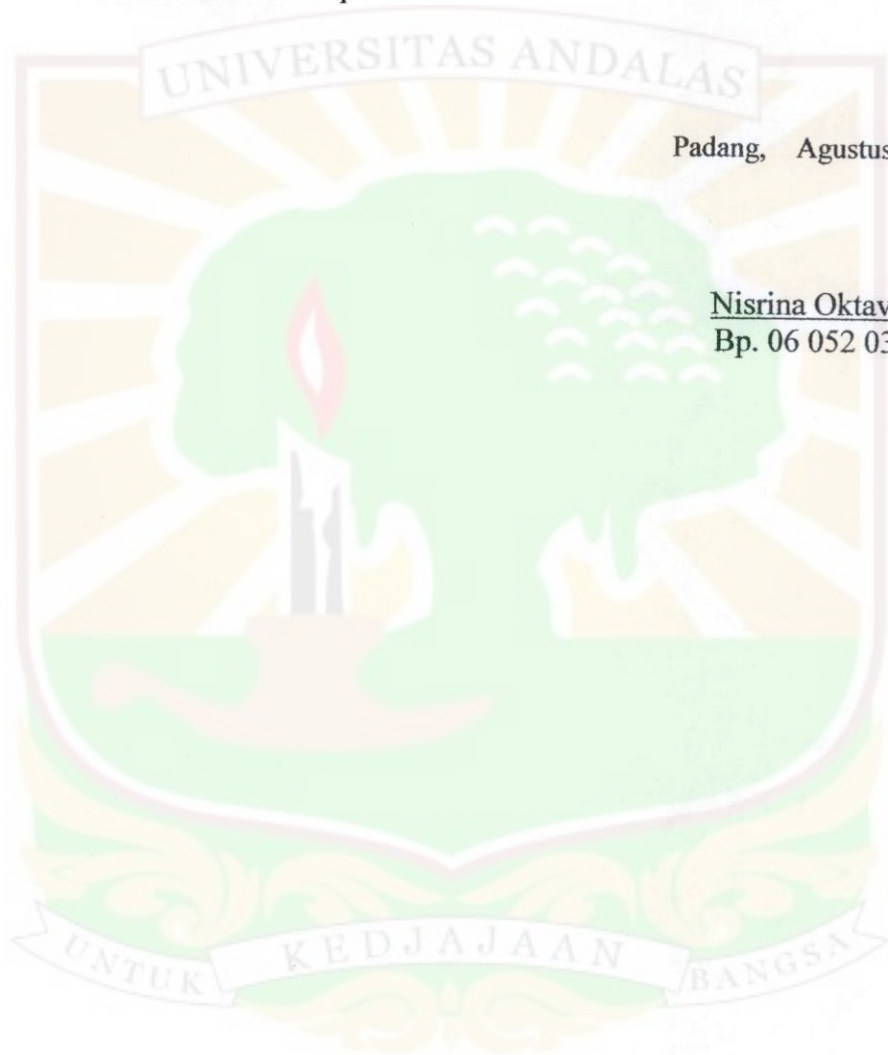
Padang, Mei 2009
Bappeda Kota Padang
Sekretaris,

SYAHRUL, SE. MSi.
Pembina/NIP. 410009416



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Laporan Magang ini adalah hasil karya saya sendiri, dan tidak terdapat karya atau tulisan penulis lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar A.Md (Ahli Madya) di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang / penulis lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.



Padang, Agustus 2009

Nisrina Oktavia
Bp. 06 052 034

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. S.W.T yang dengan kuasa dan kehendak-Nya telah memberikan kekuatan, kesabaran dan ketekunan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan penulisan laporan magang yang berjudul “Proses Penyusunan Perencanaan dan Anggaran pada Bappeda Kota Padang”.

Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah sebagai salah satu syarat guna memenuhi sebagian dari syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Muda (A.Md) di Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Orang Tua tercinta, Ayahanda Syafraini dan Ibunda Yarnis yang dengan doa, motivasi dan inspirasi yang tiada terbatas yang diberikan telah menguatkan penulis untuk senantiasa tiada berhenti berbuat yang terbaik.
2. Keempat kakak beserta keluarga yang selalu memberikan dukungan beserta kesempatan. Uda Zuli Hendri dan Kak Desra Herlina S.Pi di Pekanbaru, Uda Muhammad Ropi dan Uni Budianetti, S.Pd di Alahan Panjang, Uda Fauzan Misra, S.E, M.Sc, Ak dan Uni Mayar Afriyenti, S.E, M.Sc di Padang serta Uda Ismet Hellidumar yang sangat perhatian. Bagi kalianlah setiap langkah maju ini penulis persembahkan. Juga buat empat keponakan tersayang, genggamlah dunia di tangan dan akhirat di hati kalian.
3. Ibuk Dra. Mailini Malik, MM, selaku koordinator Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
4. Ibu Nini Sofriyeni, SE, M.Si, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
5. Bapak Suhandi, SE. M.Si. Akt, sebagai pembimbing magang yang telah memberikan waktu dan tempat serta pengarahan kepada penulis sehingga Laporan Kerja Praktek ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Drs. Fauzi Saad, Ak dan Ibu Nini Syofriyeni, SE, M.Si, Ak sebagai dosen penguji ujian komprehensif

7. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan arahan dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
8. Teman-teman Angkatan 2006 khususnya Jurusan Akuntansi yang selama ini telah membantu penulis selama kuliah dan pelaksanaan magang sampai Laporan Magang ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Keluarga Dang Te di kampung, Batam dan Jakarta. Keberhasilan ini adalah milik kita semua. Terutama buat *Ni Manie*, makasih sudah dengan sabar ngantarin untuk pergi bimbingan.
10. Buat sahabatku Meta, Dini, i2, Gia, Ayu, Cwit, Siera dan Suci cepat nyusul ya. Di Tunggu kehasilannya dan teruslah bersemangat.
11. Buat adik2 di Kos Palanta, Connie, Cwi, Yanti, Eva dan Riska kuliah yang rajin semoga kalian semua sukses.
12. Pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari Laporan Magang ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis menerima kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak. Dan akhirnya penulis berharap Laporan Kerja Praktek ini ada manfaatnya bagi penulis sendiri, Bappeda Kota Padang dan pihak-pihak lainnya.

Padang, Agustus 2009

Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1.Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2.Rumusan Masalah | 3 |
| 1.3.Tujuan dan Manfaat Penulisan..... | 3 |
| 1.4.Metode Penelitian..... | 5 |
| 1.5.Tempat dan Waktu Magang | 5 |
| 1.6.Rencana Kegiatan Magang | 6 |
| 1.7.Sistematika Penulisan | 7 |
| BAB II. LANDASAN TEORI..... | 8 |
| 2.1. Pengertian Perencanaan dan Penganggaran | 8 |
| 2.2. Integrasi Perencanaan dan Penganggaran | 11 |
| 2.3. Tahapan Perencanaan | 13 |
| 2.4. Perencanaan Strategis..... | 15 |
| 2.4.1. Manfaat Perencanaan Strategis | 16 |
| 2.4.2. Perencanaan Strategik dan Akuntansi Sektor Publik Pemerintah..... | 18 |

| | |
|--|-----------|
| 2.5. Rencana Kerja | 19 |
| 2.6. Rencana Kerja Anggaran | 21 |
| BAB III. GAMBARAN UMUM BAPPEDA | 23 |
| 3.1. Sejarah Berdirinya bappeda Kota Padang..... | 23 |
| 3.2. Lokasi Bappeda Kota Padang | 24 |
| 3.3. Tugas pokok Bappeda Kota Padang | 24 |
| 3.4. Fungsi Bappeda Kota Padang | 24 |
| 3.5. Visi dan Missi Bappeda Kota Padang..... | 25 |
| 3.6. Tujuan Bappeda Kota Padang..... | 26 |
| BAB IV. PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DI BAPPEDA KOTA PADANG | 42 |
| 4.1. Proses Penyusunan Perencanaan | 42 |
| 4.2. Proses Penyusunan Perencanaan Srategik di Bappeda kota padang..... | 44 |
| 4.3. Proses penyusunan Rencana Kerja..... | 45 |
| 4.4. Proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran(RKA)..... | 47 |
| BAB V. KESIMPULAN..... | 50 |
| 5.1. Kesimpulan | 50 |
| 5.2. Saran..... | 51 |

LAMPIRAN

DAFTAR KEPUSTAKAAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) merupakan badan/ instansi pemerintah yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur/ Kepala Daerah Tingkat I. Bappeda sebagai salah satu lembaga/ instansi pemerintahan bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Negara, sehingga tidaklah bisa dipungkiri bahwa dalam penyelenggaraan kegiatannya dibutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit, baik di bidang akutansi maupun di bidang lainnya.

Pemerintah daerah pada saat ini dihadapkan pada banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik.

Selama ini perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena berkaitan dengan tujuan pemerintahan itu sendiri untuk mensejahterakan rakyatnya. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya *output* dari perencanaan adalah penganggaran.

Tujuan pembangunan dapat dipahami sebagai akibat akhir dari seluruh pembangunan. Sedangkan, strategi atau perencanaan pembangunan merupakan pilihan lintas sebab akibat yang secara sistematis dilakukan dan asumsi-asumsi yang diharapkan tersedia, agar tujuan pembangunan tercapai. Asumsinya adalah keadaan-keadaan yang

diluar kendali pemerintah daerah atau keadaan-keadaan yang lebih baik atau lebih tepat disediakan oleh pihak-pihak lain dalam upaya pembangunan secara keselur, namun akan memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan.

Sebagai dampak sebuah pilihan, strategi sebagai pilihan lintas sebab akibat tersebut mempunyai konsekuensi biaya dan resiko pembangunan yang berbeda-beda. Semakin banyak asumsi dalam rencana pembangunan, biaya pembangunan di harapkan akan mengecil. Sementara resiko kegagalan pembangunan semakin besar. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran daerah, satu tahapan yang harus dilakukan adalah perencanaan. Dalam tahapan ini, arah dan tujuan dari suatu program pemerintah ditentukan.

Dalam berbagai kajian, perencanaan diartikan sebagai fungsi utama manajemen pembangunan dalam proses bernegara. Fungsi ini muncul sebagai akibat dari kebutuhan akan pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya. Dengan perencanaan pembangunan yang baik, kegiatan pembangunan dapat dirumuskan secara efisien dan efektif dengan hasil yang optimal.

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi krisis tersebut telah membawa dampak yang luar biasa pada tingkat kemiskinan, namun disisi lain, krisis tersebut dapat juga memberi berkah tersembunyi bagi upaya peningkatan taraf hidup seluruh rakyat Indonesia dimasa yang datang.

Krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang dialami telah membuka jalan bagi munculnya reformasi total diseluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Tema sentral reformasi total tersebut adalah mewujudkan masyarakat madani, terciptanya *good*

governance dan mengembangkan model pembangunan yang berkeadilan. Reformasi ini juga telah memunculkan sikap keterbukaan dan fleksibilitas sistem politik dan kelembagaan sosial sehingga mempermudah proses pengembangan dan modernisasi lingkungan legal dan regulasi untuk pembaharuan paradigma diberbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan hal diatas, penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut selama melaksanakan kegiatan magang. Dengan salah satu alasannya karena proses perencanaan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap jalannya pembangunan. Dengan demikian penulis akan membuat laporan magang ini dengan judul :**“PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PADANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam melakukan pembahasan terhadap proses penyusunan perencanaan dan anggaran daerah, ruang lingkup dibatasi pada proses penyusunan Renstra(Perencanaan Strategis), Renja(Rencana Kerja) dan RKA(Rencana Kerja Anggaran) di Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam melaksanakan proses penyusunan rencana dan anggaran.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Dari penelitian terhadap proses penyusunan perencanaan dan anggaran di Bappeda, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran dalam proses penyusunan perencanaan dan anggaran pada Bappeda Kota Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada BAPPEDA Kota Padang.
3. untuk melaksanakan kurikulum Program Diploma III agar nantinya dapat tercipta ahli madya yangampil dan profesional.
4. sebagai bahan studi dalam pembuatan laporan yang merupakan syarat tugas akhir dari kegiatan magang.

Sedangkan manfaat yang hendak dicapai dari penulisan laporan kerja praktek ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat memperdalam pengetahuan penulis mengenai bagaimana proses penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran dalam rangka melaksanakan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang, serta dapat membandingkan teori yang di dapat dengan kenyataan yang ada dilapangan.

2. Bagi Bappeda

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak manajemen dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

3. Bagi pihak lain

Dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana proses penyusunan perencanaan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh badan perencanaan pembangunan daerah Kota Padang.

1.4 Metode Penelitian

Di dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi Lapangan

Yaitu dengan melakukan peninjauan langsung ke Bappeda Kota Padang dengan cara melakukan wawancara dengan karyawan-karyawan yang bersangkutan dan dengan pihak-pihak lain yang terkait, guna mendapatkan informasi yang berhubungan dengan proses penyusunan Perencanaan dan Penganggaran di Bappeda Kota Padang.

b. Studi Kepustakaan

Yaitu mencari serta mengumpulkan data sebagai dasar teoritis seperti dari buku-buku, artikel, bahan kuliah serta literatur lain yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Kegiatan magang dilakukan di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang. yang dilakukan selama jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 2 bulan (40 hari kerja) yang dimulai pada tanggal 23 Maret sampai dengan 15 Mei 2009.

1.6 . Rencana Kegiatan Magang

Rencana kegiatan yang akan dilakukan selama magang di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang.

Tabel
Rencana Kegiatan Magang

| No | Rencana Kegiatan | Waktu |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Pengajuan proposal magang | Februari 2009 |
| 2. | Pengajuan permohonan surat izin magang | Maret 2009 |
| 3. | Pengajuan dan penyerahan proposal magang oleh pembimbing teori | Maret 2009 |
| 4. | Pengarahan tentang pengaturan magang oleh pembimbing praktek pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), kota Padang. | Maret 2009 |
| 5. | Berlangsungnya kegiatan magang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), kota Padang. | 23 Maret s/d 15 Mai 2009 |
| 6. | Pembuatan laporan magang | Mai s/d selesai |

1.7 Sistematika Penyusunan

- BAB I** Berisikan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang, rencana kegiatan, metode analisa dan sistematika penyusunan.
- BAB II** Merupakan pembahasan yang menjelaskan tentang landasan teori yang berisikan mengenai pengertian perencanaan, manfaat perencanaan, serta penjelasan tentang perencanaan strategis, rencana kerja dan rencana kerja anggaran.
- BAB III** Menjelaskan tentang gambaran umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang yang meliputi sejarah pendirian, visi dan misi, ruang lingkup usaha dan struktur organisasi lainnya.
- BAB IV** Mengemukakan penjelasan tentang proses penyusunan perencanaan dan Penganggaran pada Bappeda Kota Padang.
- BAB V** Merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan isi laporan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Perencanaan dan Penganggaran

Pelaksanaan otonomi daerah secara normatif ditunjukkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis yang ditandai dengan meningkatkan partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan perencanaan dan pembangunan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah melalui wadah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan mulai dari tingkat desa sampai ke tingkat kabupaten/kota.

Gejala tumbuhnya sikap tidak peduli bahkan antipati terhadap program-program pemerintah justru disebabkan oleh model perencanaan Top Down yang selama ini diterapkan pemerintah, model ini kurang menjamin tumbuhnya rasa kepemilikan masyarakat warga terhadap proses dan hasil kegiatan pembangunan.

Menyadari hal ini pemerintah dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan supaya perencanaan pembangunan betul-betul berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dari bawah. Tentang tekanan dari gagasan ini adalah pada partisipasi warga dan proses demokratisasi perencanaan pembangunan di seluruh tahapan, mulai dari tahapan kelurahan, kecamatan, dan kota. Dengan tujuan untuk membangun rasa kepemilikan dan saling mempercayai antara warga masyarakat dengan pemerintah daerah, serta untuk mencapai hasil perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dalam rangka penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan ini dibutuhkan oleh setiap jenis kegiatan baik organisasi perusahaan, pendidikan dan instansi pemerintah,

Tujuan pembangunan dapat dipahami sebagai akibat dari seluruh upaya pembangunan. Sedangkan strategi atau perencanaan pembangunan merupakan pilihan lintas sebab akibat yang secara sistematis dilakukan dan asumsi-asumsi yang diharapkan tersedia, agar tujuan pembangunan tercapai. Asumsinya adalah keadaan-keadaan yang diluar kendali pemerintah daerah atau keadaan-keadaan yang lebih baik atau lebih tepat disediakan oleh pihak-pihak lain dalam upaya pembangunan secara keseluruhan, namun akan mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan.

Dalam berbagai kajian, perencanaan pembangunan dapat di artikan sebagai fungsi utama manajemen pembagunan dalam proses bernegara. Fungsi ini muncul sebagai akibat dari kebutuhan akan pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya. Dengan perencanaan pembagunan yang baik, kegiatan pembangunan dapat dirumuskan secara efisien dan efektif dengan hasil yang optimal.

Secara sederhana, pengertian perencanaan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program pembangunan daerah oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota. proses ini dilakukan secara terpadu dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat didaerah yang bersangkutan.

Menurut Yuwono, Utomo, Zein dan Asrafiany (2008), Perencanaan dan penganggaran merupakan dua siklus yang tidak dapat dipisahkan dalam fungsi manajemen. Sama halnya jika di tinjau dari sisi manajemen strategis, perencanaan dan penganggaran daerah merupakan satu kesatuan. Menurut perencanaan(strategis), pendanaan suatu strategi harus terjamin. System penganggaran juga memandang bahwa setiap pengeluaran penganggaran harus memiliki acuan dan kerangka yang jelas mengapa muncul suatu mata anggaran. Dalam pelaksanaan selanjutnya, proses perencanaan dan penganggaran daerah membutuhkan system pengendalian agar perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Mengacu pada tujuan tersebut, proses perencanaan daerah tidak dapat terlepas dari pengendalian aktifitas, sedangkan penganggaran daerah terkait dengan system pengendalian keuangan.

Secara sederhana, pengertian perencanaan pembangunan daerah dapat didefinisikan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan dan program pembangunan daerah oleh pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/ kota. Proses ini dilakukan secara terpadu dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rangkaian proses ini dilakukan dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan dunia global,(Bastian, 2006).

Menurut Bastian (2006), manfaat perencanaan daerah adalah:

1. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dalam mencapai tujuan
2. Sebagai alat ukur, standar pengawasan atau evaluasi
3. Sebagai bahan perkiraan penentuan alternatif terbaik dalam skala penggunaan sumber daya yang tersedia.

Selain yang disebutkan diatas, perencanaan pembangunan daerah bermanfaat dalam mencegah terjadinya jurang kemakmuran antar daerah, melestarikan kebudayaan setempat, dan dapat menghindarkan timbulnya ketidakpuasan masyarakat. Dengan adanya kepuasan masyarakat, kestabilan dalam masyarakat dapat tercipta.

Pada saat ini sistem penganggaran pemerintah dilaksanakan dalam empat langkah yaitu :

1. Pada tingkat ekonomi makro, prediksi kondisi ekonomi jangka menengah dilakukan, termasuk prediksi penerimaan, sumber daya dalam negeri/luar negeri yang tersedia untuk pemerintah, dan tingkat deficit/utang.
2. Pada tingkat nasional, perencanaan lima tahunan dilakukan, tetapi dalam konteks jangka menengah, hubungan antara perencanaan dan penganggaran tidak dapat didefinisikan.
3. Pada tingkat kementerian/sektoral, perencanaan dilakukan dengan penyusunan rencana strategis lima tahunan dan rencana kerja tahunan, hubungan antara perencanaan tingkat sektoral dan penganggaran, khususnya dalam konteks jangka menengah sangat lemah.
4. Penganggaran ganda(*Dual Budgeting*), rutin dan pembangunan dilakukan dalam konteks satu tahun. Kaitan antara anggaran dan prediksi ekonomi makro sangat lemah dan hanya berfokus pada pembangunan jangka pendek.

2.2. integrasi perencanaan dan penganggaran.

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkain kegiatan dalam satu kesatuan atau komitmen. Penyusunan rencana perlu memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia.

Sehingga dalam penerapannya, konsekuensi atas integrasi kegiatan perencanaan dan penganggaran perlu diperhatikan.

Butir-butir yang perlu diperhatikan dalam mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran menurut Bastian (2006) adalah sebagai berikut :

1. Sejak awal penyusunan rencana sudah harus besaran sumber daya finansial (anggaran) indikatif, sebagai factor yang harus dipertimbangkan mulai dalam pembahasan dimusyawarah perencanaan pembangunan desa, kecamatan, forum satuan kerja perangkat daerah, dan musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan propinsi.
2. Prioritas kegiatan untuk setiap SKPD sudah sama formasinya sejak dari hasil rencana kerja perangkat daerah (SKPD), rencana kerja (Renja) SKPD sehingga rencana kerja anggaran (RKA) SKPD.
3. Disamping kapasitas fiskal (untuk tahun anggaran), RKPD dan Renja SKPD ang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan kabupaten/kota atau propinsi, serta hasil forum SKPD perlu menjadi rujukan utama, bila bukan satu-satunya rujukan dalam pembahasan kebijakan umum APBD, serta prioritas serta plafon anggaran SKPD.
4. DPRD ataupun pemerintah daerah memahami aktifitas pengawalan konsistensi prioritas kegiatan hasil perencanaan partisipasi dalam proses penganggaran.
5. Output setiap tahapan dalam proses perencanaan dan penganggaran dapat diakses oleh setiap peserta perencanaan partisipasi.

Perencanaan adalah formulasi terinci dan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan akhir tertentu, oleh sebab itu perencanaan mensyaratkan penetapan tujuan dan identifikasi

metode untuk mencapai tujuan tersebut. Pengendalian adalah kegiatan memonitor pelaksanaan rencana dan tindakan korektif sesuai kebutuhan untuk memastikan rencana tersebut berjalan sebagaimana seharusnya. Pengendalian biasanya dicapai dengan menggunakan suatu umpan balik (feedback). umpan balik adalah informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi atau memperbaiki langkah-langkah yang dilakukan dalam mengimplementasikan suatu rencana. Berdasarkan umpan balik manajer atau pekerja dapat memutuskan untuk membiarkan pelaksanaan tersebut berlangsung, mengambil beberapa jenis tindakan korektif agar langkah yang di ambil sesuai dengan rencana awalnya. atau melakukan perencanaan ulang di tengah proses pelaksanaan, Informasi umpan balik disediakan oleh informasi akuntansi.

Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan di antara berbagai alternatif, fungsi manajerial pengambilan keputusan ini merupakan jalinan antara perencanaan dan pengendalian. Pemerintah tidak dapat membuat rencana tanpa pengambilan keputusan, pemerintah harus memilih satu diantara beberapa tujuan dan metode untuk tujuan yang dipilih.

2.3. Tahapan Perencanaan

Bertemunya kegiatan perencanaan dan kegiatan penganggaran adalah kegiatan tahunan, dimana pemerintah daerah menyusun rencana kerja. Berikutnya, kegiatan yang direncanakan tersebut dianggarkan untuk mendapatkan dana. Kegiatan mengalokasikan dana untuk kegiatan tersebut bias disebut dengan proses penganggaran. Prinsip utama dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah menyusunn dan menganggarkan prioritas kegiatan yang disepakati dengan tidak melebihi kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan. Di sisi lain, rencana pembangunan tahunan adalah turunan rencana

pembangunan jangka menengah yang mendapatkan konfirmasi dari para pemangku kepentingan daerah untuk dilaksanakan dalam tahun rencana. Untuk itu, dalam menyusun rencana jangka menengah, diperlukan kebijakan keuangan daerah untuk membahas usaha penyediaan pendanaan pembangunan untuk jangka menengah sesuai dengan kapasitas fiskalnya juga. Proyeksi pendapatan dan belanja daerah diperkenalkan untuk mendapatkan gambaran pendanaan guna implementasi serta rencana pembangunan jangka menengah.

Dari sisi proses penganggaran, integrasi kegiatan perencanaan dan penganggaran diupayakan melalui kerangka belanja jangka menengah (*MTEF-Mid Term Expenditure Framework*). Melalui MTEF, anggaran tidak hanya disusun untuk tahun rencana atau satu tahun sesudah tahun berjalan. Dengan demikian, kesinambungan kegiatan dan penyiapan pendanaannya lebih terencana dan terkontrol. Kegiatan kritis lainnya dalam mengintegrasikan kegiatan perencanaan dan penganggaran adalah memastikan adalah memastikan kegiatan yang dianggarkan namun tidak melalui proses perencanaan pembangunan daerah. sehingga, kegiatan yang dianggarkan namun tidak melalui proses perencanaan menjadi minimum atau sama sekali tidak ada. Untuk itu, kegiatan perencanaan dan penganggaran merupakan kegiatan yang kontinu.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahap :

1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana
4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga secara keseluruhan seluruh siklus perencanaan yang utuh terbentuk. Pencapaian kinerja dari satu tahap pelaksanaan rencana dievaluasi untuk menjadi pertimbangan dalam penganggaran tahun berikutnya, sehingga penganggaran menjadi wajar dan berbasis kinerja. Implementasi rencana dan pengendaliannya serta evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari siklus perencanaan yang amat menentukan kebijakan penganggaran. Untuk itu, kedudukan perencanaan dan penganggaran dalam proses pembangunan merupakan kegiatan penting dalam mata rantai guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

2.4. Perencanaan Strategis

Rencana merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang timbul. oleh karena itu renstra merupakan analisis untuk pengambilan keputusan strategis tentang masa depan organisasi dalam rangka memosisikan pada masa yang akan datang. dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM daerah yang disiapkan oleh Bappeda, kepala satuan kerja perangkat daerah menyiapkan rancangan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang memuat misi, visi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan (Yuwono, Utomo, Cahyo dan Azrafiany, 2008).

Perencanaan merupakan proses pembuatan keputusan yang dilaksanakan, sedangkan rencana adalah hasil perencanaan yang memuat kumpulan yang akan

dilaksanakan. Strategi merupakan siasat atau upaya untuk mengambil keuntungan dari suatu kompetisi secara rasional, jadi rencana strategic adalah hasil perencanaan strategic yang memuat kumpulan keputusan strategis yang akan atau belum dilaksanakan.

Sebagaimana dimaklumi bahwa saat ini pemerintah daerah harus membuat perencanaan strategis. Artinya, daerah dalam menjalankan otonomi daerah harus berupaya dengan disiplin untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi pemerintahan daerah. Hal ini meliputi apa yang dikerjakan pemerintah dan mengapa pemerintah daerah mengerjakan hal semacam ini.

Menurut Olsen dan Eadie dalam Halim (2007) perencanaan strategis adalah upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu. Perencanaan strategis mensyaratkan implikasi masa depan dari keputusan yang diambil sekarang. Perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi keputusan.

2.4.1. Manfaat Perencanaan Strategis

Banyak alasan mengapa pemerintah daerah menyelenggarakan perencanaan strategis.

Diantara alasan-alasan tersebut menurut Halim (2007) adalah sebagai berikut :

1. Karena menghadapi berbagai tuntutan yang saling berbenturan maka kita memerlukan suatu proses untuk menetapkan prioritas kita.

2. Dapat menghadapi deficit anggaran yang parah kecuali kita secara drastis memikirkan ulang cara kita menjalankan bisnis
3. Masalah mengemuka dihadapan kita dan kita memerlukan cara tertentu untuk membantu kita berfikir tentang resolusinya, atau kalau tidak kita akan terluka parah.

Sementara itu dalam literature lain disebutkan bahwa perencanaan strategis dapat membantu organisasi :

1. Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif,
2. Memperjelas rencana masa depan,
3. Menciptakan prioritas,
4. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekwensi masa depan,
5. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuatan keputusan,
6. Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang berada di bawah kontrol organisasi,
7. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi,
8. Memecahkan masalah utama organisasi,
9. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif,
10. Membangun kerja kelompok dan keahlian.

Hal terpenting dari perencanaan strategis adalah pemerintah daerah melihat strategi yang terbaik dengan menganalisis kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) internal serta mengenali ancaman (*threats*) dan peluang (*opportunities*) eksternal dilingkungan luar pemerintah daerah.

Proses perencanaan strategis menurut Halim (2007) terdiri dari delapan langkah :

1. Memprakarsai dan menyepakati suatu proses perencanaan strategis
2. Mengidentifikasi mandat organisasi (pemerintah daerah)
3. Memperjelas misi dan nilai organisasi
4. Menilai lingkungan eksternal, peluang dan ancaman
5. Menilai lingkungan internal, kekuatan dan kelemahan
6. Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi
7. Merumuskan strategi dan mengelola isu-isu
8. Menciptakan visi organisasi yang efektif di masa datang.

2.4.2. Perencanaan Strategik dan Akuntansi Sektor Publik Pemerintah Daerah

Rencana Strategik Pemerintah Daerah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Unsur-unsur inilah yang akan membentuk visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan yang tepat bagi pemerintah daerah dalam membangun daerahnya.

Dalam pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan renstra, akuntansi sektor public adalah suatu unsur yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah daerah. baik kepada pemerintah melalui DPRD maupun kepada pemerintah pusat, sebagai stakeholder yang utama. Semakin baik dan lengkap akuntansi yang dijalankan, semakin baik dan

lengkap pula pertanggungjawabannya yang pada akhirnya semakin baik pula pemerintahannya hingga *good governance* dapat diwujudkan.

Perencanaan strategis mempunyai peran dalam menjelaskan cara-cara yang akan dilakukan organisasi untuk mencapai tujuan dan menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan dan alokasi sumber-sumber ekonomi (anggaran dan asset) yang tentunya sangat tergantung dari informasi dari laporan keuangan akuntansi sektor publik. Dalam perencanaan penganggaran, akuntansi sector public mempunyai peran dalam menyusun anggaran daerah, dimana dapat dilihat dari kemungkinan kemampuan pemerintah daerah yang tergambar dalam laporan arus kas dan asset daerah yang terdapat dalam laporan neraca daerah. hal ini memudahkan proses koordinasi, pengorganisasian dan komunikasi internal, serta manfaatnya yang sangat penting sebagai pedoman untuk mengevaluasi dan mengadakan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan dan sasaran organisasi yang menghalangi pencapaian visi dan misi pemerintah daerah.

2.5. Rencana Kerja

Desentralisasi membawa implikasi perubahan mendasar dalam tatanan pemerintahan, sehingga terjadi juga perubahan peran dan fungsi birokrasi mulai dari tingkat Pusat sampai ke Daerah. Perubahan yang mendasar itu memerlukan juga pengembangan kebijakan yang mendukung penerapan desentralisasi dalam mewujudkan pembangunan sesuai kebutuhan Daerah dan diselenggarakan secara efisien, efektif dan berkualitas. Pembangunan diarahkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan yang saling mendukung. Dalam kerangka desentralisasi, pembangunan ditujukan untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berlandaskan prakarsa dan aspirasi masyarakat

dengan cara memberdayakan, menghimpun, dan mengoptimalkan potensi daerah untuk kepentingan daerah dan prioritas Nasional. selain hal-hal di atas, berbagai perubahan dan perkembangan dalam skala luas turut mempengaruhi perubahan arah pembangunan di masa yang akan datang. Untuk dapat meningkatkan daya tangkal dan daya juang pembangunan, tinjauan kembali terhadap kebijakan pembangunan merupakan keharusan.

Didalam PP Nomor 20/2004 tentang rencana kerja pemerintah, rencana kerja pemerintah yang selanjutnya disebut dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk satu tahun. Ditingkat daerah RKP disebut dengan RKPD yang merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang mengaju pada RKP.

RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, kepala daerah berdasarkan RKPD kemudian merancang kebijakan umum APBD(KUA).

Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD selambat-lambatnya pertengahan juni tahun berjalan. Kemudian, rancangan KUA yang telah dibahas kepala daerah bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD selanjutnya disepakati menjadi KUA.

Berdasarkan KUA yang disepakati, pemerintah daerah dan DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara yang diamapikan oleh kepala daerah. Selanjutnya, KUA, prioritas serta plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Kemudian, berdasarkan nota

keepakatan tersebut kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA SKPD.

Penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertujuan untuk :

1. Mengetahui kondisi umum pembangunan kota padang
2. Mengetahui visi dan misi pembangunan Kota Padang
3. Mengetahui kebijakan pembangunan Kota Padang
4. Mengetahui program dan kegiatan Kota Padang.

2.6. Rencana Kerja Anggaran

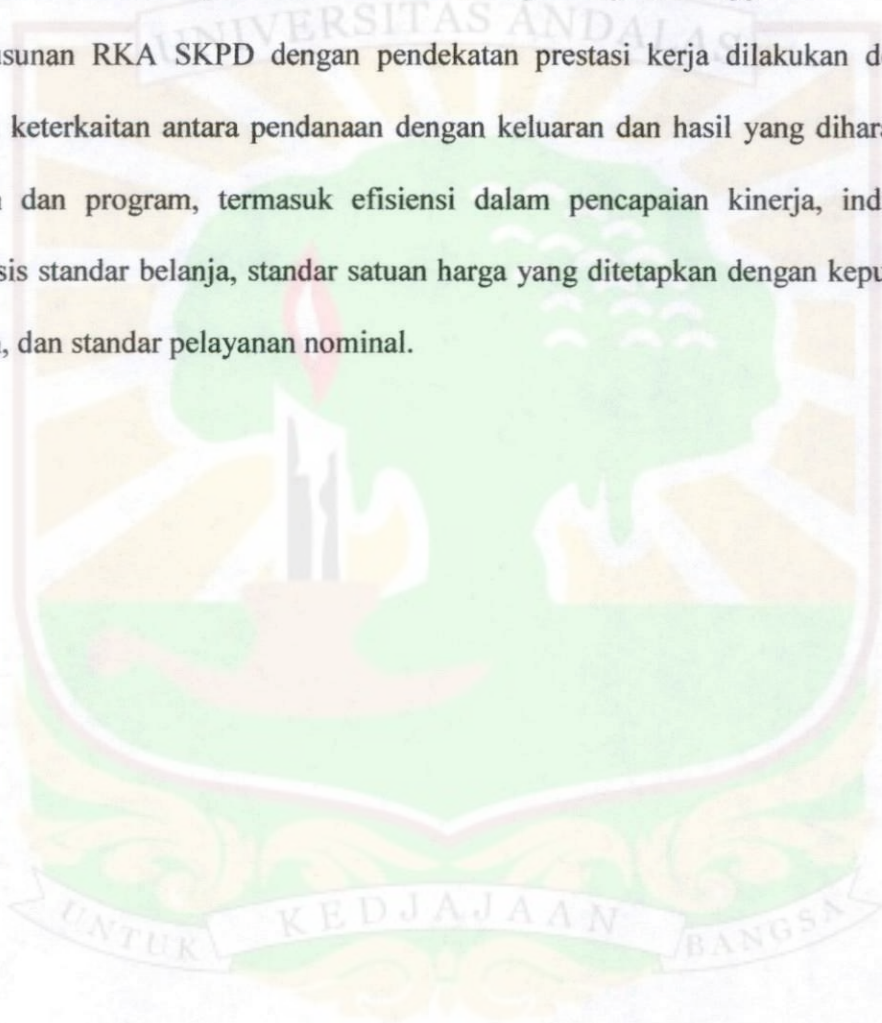
Rencana kerja dan anggaran SKPD (RKA SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Rencana kerja anggaran (RKA) disusun oleh kepala SKPD berdasarkan pedoman penyusunan RKA SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berdasarkan prestasi kinerja. RKA SKPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program, dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan yang dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan disertai dengan perkiraan maju untuk tahun berikutnya.

Penyusunan RKA SKPD dengan menggunakan pendekatan kerangka kerja pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan penyusunan perkiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran setelah tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan

implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya(PP Nomor 58/2005 pasal 137).

Sementara, penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen kerangka kerja dan anggaran.

Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program, termasuk efisiensi dalam pencapaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, dan standar pelayanan nominal.



BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA PADANG

3.1. Sejarah Berdirinya Bappeda Kota Padang

Fungsi perencanaan di dalam pembangunan Nasional dan Daerah merupakan salah satu faktor yang menentukan bagi tercapainya tujuan pembangunan Nasional Bangsa Indonesia, terutama sekali dalam mendorong peningkatan dan untuk menciptakan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Suatu rencana yang baik akan dapat membantu dan menjamin keberhasilan bagi pelaksanaan pembangunan. Pentingnya fungsi perencanaan dalam usaha menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya bagi Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kotamadya) ditegaskan dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1980 tentang “ Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Hal ini lebih lanjut diatur di dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 tentang “Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II”.

Dengan keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 Tahun 1980 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185 Tahun 1980 di atas dan kemudian dikuatkan oleh Gubernur Daerah I tentang “Tipe Bappeda”, maka pada akhir tahun 1981 setiap Daerah Tingkat II di Sumatera Barat telah membentuk suatu lembaga atau badan yang khusus mengelola bidang perencanaan pembangunan daerah yang dikenal dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang.

3.2. Lokasi Bappeda Kota Padang

Bappeda Kota Padang terletak di Jalan Prof. H. M. Yamin, SH. No. 70 Padang. Bagi Kota Padang, Bappeda ini merupakan suatu badan baru yang memerlukan pembinaan baik ke dalam maupun ke luar organisasinya. Tugas perencanaan pembangunan pada akhirnya akan melibatkan hampir semua instansi otonom dan instansi sentral yang ada di dalam suatu daerah Kota Padang. Oleh sebab itu, berhasilnya penyusunan rencana pembangunan daerah secara terpadu akan ditentukan oleh kerjasama dan koordinasi Bappeda dengan semua lembaga pemerintahan yang ada di sekitarnya.

3.3. Tugas Pokok Bappeda Kota Padang

Tugas pokok Bappeda Kota Padang adalah untuk membantu Walikota dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Padang, serta penilaian atas pelaksanaannya, dan mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta mengkoordinasikan aspek - aspek perencanaan di seluruh unit yang terdapat di wilayahnya

3.4. Fungsi Bappeda Kota Padang

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut Bappeda mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri dari pola umum pembangunan jangka panjang, pola umum pembangunan jangka panjang dan pola umum propeteda daerah.
2. Menyusun Rencana Pembangunan Tahunan.
3. Menyusun Program - Program Tahunan sebagai pelaksanaan rencana - rencana tersebut yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada

Pemerintah Daerah Propinsi atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan Nasional.

4. Melakukan koordinasi perencanaan diantara dinas - dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi vertikal, kecamatan-kecamatan dan badan - badan lain yang berada dalam wilayah kerja yang bersangkutan.
5. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama - sama dengan bagian keuangan, dengan koordinasi Sekretariat Daerah.
6. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan Daerah.
7. Mengikuti persiapan & perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan di daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut.
8. Monitoring Pelaksanaan Daerah.

3.5. Visi dan Misi Bappeda Kota Padang

a. Visi Bappeda Kota Padang

Sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Perda No. 7 Tahun 2000 tentang pola dasar Pembangunan Daerah Kota Padang 2004-2009 bahwa Visi Kota Padang adalah “terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera berbasis perdagangan jasa yang berdaya saing tinggi dalam kehidupan perkotaan yang tertib dan teratur”.

Berdasarkan Visi Kota Padang tersebut, maka visi Bappeda Kota Padang adalah “Perencanaan yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat”. Perencanaan yang bermanfaat bagi daerah dan masyarakat mengandung arti bahwa Bappeda sebagai badan perencanaan harus dapat menyusun suatu rencana pembangunan yang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengkoordinasikan suatu rencana yang melibatkan tiga domain yaitu pemerintahan, swasta, dan masyarakat. Perencanaan yang bermanfaat bagi daerah sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Misi Bappeda Kota Padang

Untuk menjalankan Visi Bappeda Kota Padang tersebut, maka diperlukan misi sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Jangka Pendek , Menengah dan Jangka Panjang.
2. Menunjang terlaksanannya fungsi pelayanan umum, meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana terhadap organisasi perangkat daerah.
3. Menyusun jaringan kerja dibidang perencanaan dan meningkatkan pelayanan koordinasi, perumusan dan penyusunan program anggaran / keuangan.
4. Meningkatkan koordinasi, perumusan, penyiapan pedoman dan petunjuk teknis, pembinaan kelembagaan organisasi dan tata laksana dan informasi jabatan perangkat daerah Kota Padang.

3.6. Tujuan Bappeda Kota Padang

1. Mengakomodasi, memfasilitasi serta mengkoordinasikan program / kegiatan dari stakeholders sebagai bahan kebijakan perencanaan pembangunan maupun penilaian atas pelaksanaannya.
2. Mendorong dan menggerakkan pembangunan melalui implementasi secara optimal.

Sasaran Bappeda Kota Padang

1. Tersedianya dokumen hasil penelitian yang aplikasi sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Tersedianya dokumen / instrumen perencanaan pembangunan yang lebih akurat dan efektif.
3. Terakomodirnya secara optimal hasil koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sebagai masukan arah kebijakan perencanaan Pembangunan.
4. Termanfaatnya secara optimal hasil monitoring dan evaluasi untuk penilaian kinerja dari perencanaan pelaksanaan program / kegiatan.

Arah Kebijakan Umum Bappeda Kota Padang

Kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah lebih ditujukan kepada peningkatan dan pematapan perencanaan pembangunan daerah dan peningkatan koordinasi pembangunan daerah, dengan program pokok yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
4. Program Pengembangan Data Informasi
5. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
6. Program Perencanaan Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

9. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
10. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
11. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana

Dasar Hukum Badan Perencanaan pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Tahun 2004

1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
2. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

3.7. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Bagian Tata Usaha
- c. Bidang Ekonomi
- d. Bidang Sosial Budaya
- e. Bidang Fisik dan Lingkungan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi dibagi habis sekaligus dijabarkan melalui tugas pokok dan fungsi unit organisasi di lingkungan Bappeda Kota Padang yang masing-masingnya diuraikan sebagai berikut :

1. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Badan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam urusan umum, keuangan, kepegawaian, perpustakaan, pelaporan dan evaluasi.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja tahunan serta mengkoordinasikan, mengendalikan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
- b. Menyusun anggaran belanja tahunan dan mengelola administrasi pelaksanaannya.
- c. Mengelola urusan surat menyurat, urusan kepegawaian dan barang-barang inventaris serta perlengkapan penyelenggaraan kegiatan kantor.
- d. Mengkoordinasikan penyusunan program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- e. Mengkoordinasikan penyusunan RAPBD khususnya belanja kegiatan pembangunan dengan unsur-unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- f. Mengkoordinasikan tugas-tugas yang bersifat lintas bidang.

Tugas Pokok dan Fungsi Bagian Tata Usaha Bappeda tersebut dijabarkan kedalam tugas pokok dan fungsi struktur organisasi di Lingkungan Bagian Tata Usaha yang terdiri dari 2 pejabat struktural eselon IV dan 18 orang staf. Tugas pokok Bagian Tata Usaha Bappeda dibantu oleh 2 Sub Bagian.

1. Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub. Bagian Umum

b. Sub. Bagian Keuangan

2. Masing-masing Sub Bagian tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

a. Sub Bagian Umum

1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, kearsipan, urusan rumah tangga, perjalanan dinas, peralatan/perlengkapan serta pengelolaan administrasi barang-barang inventaris dan administrasi kepegawaian.

2. Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

a. Mengendalikan surat masuk dan surat keluar.

b. Mengendalikan kegiatan kearsipan.

c. Mengendalikan surat perintah perjalanan dinas.

d. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan.

- e. Melaksanakan urusan humas dan protokol.
- f. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan peralatan dan perlengkapan.
- g. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan dan kendaraan dinas.
- h. Melaksanakan pengurusan rumah tangga badan.
- i. Mengelola administrasi kepegawaian.
- j. Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
- a. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun program kerja tahunan dan melaksanakan serta mengelola administrasi keuangan badan.
2. Uraian tugas Sub Bagian Umum sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menyusun program kerja dan laporan.
 - b. Menyusun anggaran belanja badan.
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian satuan pemegang kas.
 - d. Melakukan verifikasi keuangan badan.
 - e. Menyusun dan menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan termasuk perhitungan anggaran.

- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Ekonomi

1. Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan dan penelitian dibidang pembangunan pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan energi, kehutanan dan perkebunan, perkoperasian, penanaman modal dan ketenagakerjaan.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait dibidang pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian dan perdagangan, perkoperasian, penanaman modal, ketenagakerjaan.
 - b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang ekonomi sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan.
 - c. Menyelenggarakan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya.
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian dan pendataan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan bidang ekonomi.

- e. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan bidang ekonomi.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan .

3. Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sumber Daya Ekonomi
- b. Sub Bidang UKM dan Investasi

4. Masing-masing Sub Bidang tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Bidang Ekonomi.

a. Sub Bidang Sumber Daya Ekonomi

- 1. Sub Bidang Sumber Daya Ekonomi mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian perdagangan, penanaman modal dan ketenagakerjaan.
- 2. Uraian tugas Sub Bidang Sumber Daya EKonomi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Melaksanakan penyusunan rencana program pembangunan bidang pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan energi, kehutanan perkebunan, perindustrian perdagangan dan ketenagakerjaan.
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pendataan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, peternakan,

kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan perkebunan, perindustrian perdagangan, perkoperasian dan ketenagakerjaan.

- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan dan energi, kehutanan perkebunan, perindustrian perdagangan dan ketenagakerjaan untuk penyusunan rencana program pembangunan tahun berikutnya..
- d. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Sumber Daya Ekonomi.
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Sub Bidang UKM dan Investasi

1. Sub Bidang UKM dan Investasi mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang perkoperasian, usaha kecil dan menengah serta bidang penanaman modal.
2. Uraian tugas Sub Bidang UKM dan Investasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan dengan unit kerja terkait di bidang perkoperasian, usaha kecil menengah dan Investasi.

- b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pendataan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah bidang perkoperasian UKM dan Investasi
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang perkoperasian UKM dan Investasi.
- d. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang UKM dan Investasi.
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Sosial Budaya

- 1. Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan dan penelitian dibidang pembangunan agama, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan, kepariwisataan, sosial, kependudukan, olah raga, KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- 2. Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan dengan instansi terkait di bidang agama, pendidikan, kesehatan, kepariwisataan, kebudayaan, sosial, kependudukan, olah raga, KB dan pembangunan keluarga sejahtera,

- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang sosial budaya sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan.
 - c. Menyelenggarakan inventarisasi permasalahan dibidang sosial budaya serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya.
 - d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian dan pendataan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan bidang sosial budaya.
 - e. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunann bidang sosial budaya.
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
1. Bidang Sosial Budaya terdiri dari :
- a. Sub Bidang Sosial
 - b. Sub Bidang Budaya
2. Masing-masing Sub Bidang tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Bidang Sosial Budaya
- a. Sub Bidang Sosial

1. Sub Bidang Sosial mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, olah raga, KB dan pembangunan keluarga sejahtera.

2. Uraian tugas Sub Bidang Sosial sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, olah raga, KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pendataan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, olah raga, KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang agama, pendidikan, kesehatan, sosial, kependudukan, olah raga, KB dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- d. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Sosial.
- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Sub Bidang Budaya

1. Sub Bidang Budaya mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan program rencana bidang kebudayaan dan pariwisata.
2. Uraian tugas Sub Bidang Sosial sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Melaksanakan dan menyiapkan penyusunan program rencana pembangunan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pendataan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang kepariwisataan dan kebudayaan.
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Budaya.
 - e. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

4. Bidang Fisik dan Lingkungan

1. Bidang Fisik dan Lingkungan mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan penyusunan perencanaan dan penelitian dibidang

pembangunan penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup dan pertanahan.

2. Bidang Fisik dan Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyusunan kegiatan perencanaan pembangunan dengan unit kerja terkait dibidang penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup dan pertanahan.
- b. Mengkoordinasikan dan menyusun rencana program-program pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dibidang penataan ruang, pemukiman, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup dan pertanahan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) serta dokumen perencanaan lain yang masih relevan.
- c. Menyelenggarakan inventarisasi permasalahan di bidang fisik dan lingkungan hidup serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalah dan pelaksanaannya.
- d. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian dan pendataan untuk mendukung penyusunan perencanaan pembangunan di bidang fisik dan lingkungan.
- e. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi program-program pembangunann bidang fisik dan lingkungan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

1. Bidang Fisik dan Lingkungan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan.
 - b. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Air.
2. Masing-masing Sub Bidang tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung kepada Kepala Bidang Fisik dan Lingkungan
- a. Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan
 1. Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang penataan ruang, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan.
 2. Uraian tugas Sub Bidang Sosial sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan penataan ruang, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan.
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pendataan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah bidang penataan ruang, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang penataan ruang, permukiman, lingkungan hidup dan pertanahan.
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Lingkungan.

- e. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

b. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Air

1. Sub Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyusun rencana program pembangunan dan kegiatan penelitian bidang pekerjaan umum, perhubungan.
2. Uraian tugas Sub Bidang Sosial sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Melaksanakan dan menyiapkan penyusunan rencana program pembangunan bidang sarana dan prasarana serta sumber daya air.
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pendataan untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah bidang sarana dan prasarana serta sumber daya air.
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sarana prasarana serta sumber daya air.
 - d. Menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan Sub Bidang Sarana Prasarana dan Sumber Daya Air.
 - e. Membuat laporan pelaksanaan tugas.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB IV

PROSES PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN

PADA BAPPEDA KOTA PADANG

4.1. Proses Penyusunan Perencanaan

Pada saat sekarang ini proses pembangunan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Turn Up, artinya pelaksanaan pembangunan dimulai dengan pengumpulan aspirasi masyarakat bawah yang mana hal ini dapat di laksanakan dengan dua cara yaitu dengan cara masyarakat angket dan dengan mengadakan musyawarah di tingkat kelurahan, sehingga pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan pembangunan ini, mensyaratkan (dalam tahap perencanaan) partisipasi masyarakat. Keikutsertaan masyarakat akan memnguatkan tingkat kepercayaan (akuntabilitas) dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Hal ini akan membuat ringan kerja pelaksanaan pembangunan.

Akibat keterlibatan dalam pembangunan, masyarakat akan merasakan pembangunan yang lebih nyata dengan memantau pelaksanaan program. Pelaksanaan program/kegiatan yang telah dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan dewan dan masyarakat akan lebih terarah dan tepat guna. hal ini tentu saja akan meningkatkan efektifitas kerja pemerintah dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil musyawarah di tingkat kelurahan tersebut, yaitu tentang pengumpulan daftar keinginan masyarakat, maka dapat dilaksanakan musyawarah di tingkat Kecamatan, pada saat pelaksanaan musrenbang Kecamatan ditentukan daftar

kebutuhan yang berpedoman pada daftar keinginan yang telah disusun pada saat musrenbang kelurahan. Setelah daftar kebutuhan tersedia maka akan diadakan pertemuan antara kepala SKPD dengan Camat.

Selanjutnya akan diadakan Musrenbang/ Musyawarah perencanaan pembangunan Kota, yang mana APBD Propinsi Dan APBN dalam hal ini digunakan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengajukan usulan rencana yaitu prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), selanjutnya akan tercipta usulan rencana disini ditentuka anggaran dana dan arah pembangunan yang akan dilakukan, setelah itu akan terbentuk suatu tencana definitive yaitu rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga akan terbentuk KUA(Kebijakan Umum Anggaran), yang merupakan sebuah dokumen perencanaan yang masih bersifat umum, sebagai dasar dalam membuat SP(Standar Prioritas) atau PPA(Prioritas Plafon Anggaran). Selanjutnya Bappeda sebagai suatu badan yang bertugas dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan Akan membentuk RASK(Rencana Anggaran Satuan Kerja) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam membuat APBD. Setelah APBD di syahkan maka selanjutnya akan dibuat DPA(Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

Di dalam membuat DPA terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan laporan keuangan. Apakah keadaan keuangan dan perekonomian pemerintah memungkinkan untuk di laksanakan nya pembangunan tersebut, hal ini dapat di lihat dengan berpedoman kepada keadaan keuangan pemerintah, yaitu laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, laporan neraca serta catatan atas laporan keuangan ang digunakan untuk melihat apakah dana cukup tersedia untuk melaksanakan pembangunan. Jika anggaran dana

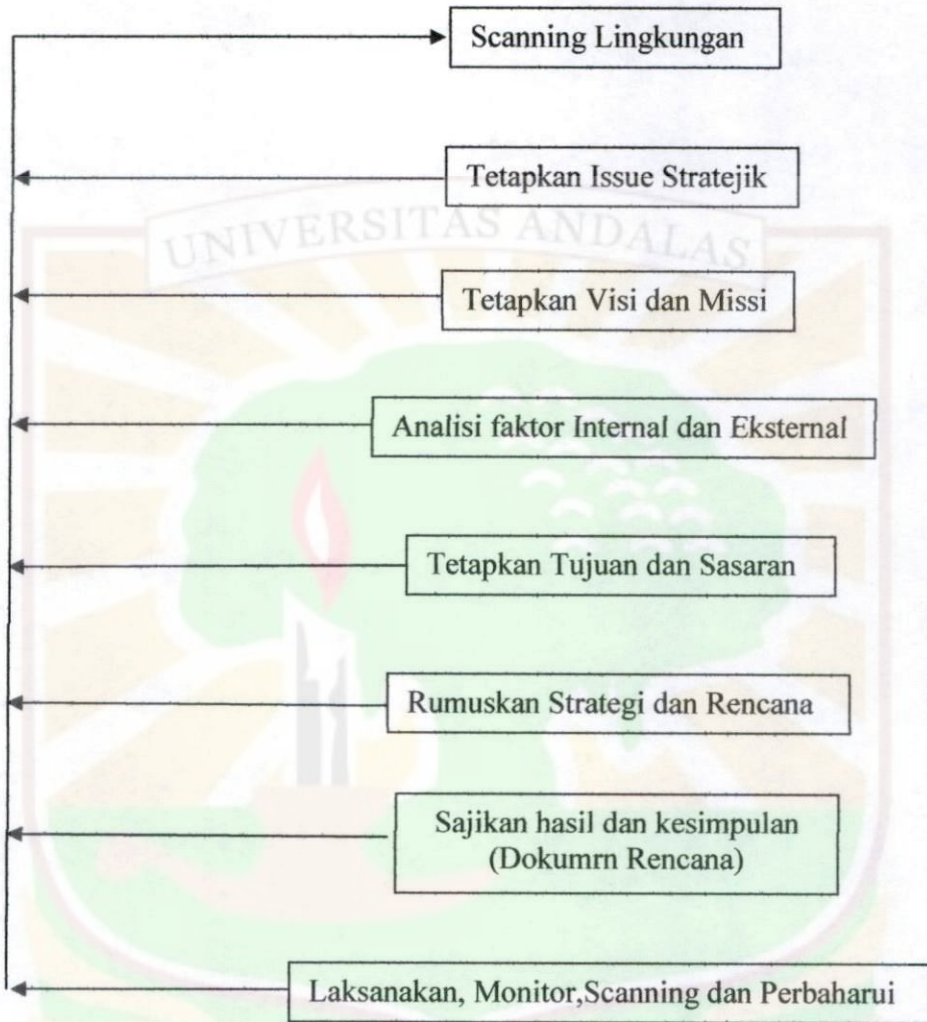
memungkinkan untuk melaksanakan pembangunan maka pembangunan dapat dilaksanakan.

4.2. Proses Penyusunan Perencanaan Srategik di Bappeda

Penyusunan perencanaan strategik di Bappeda dimulai dengan menetapkan isu strategi, setelah itu Bappeda akan menentukan visi dan missi dari perencanaan yang akan dilaksanakan, analisis factor internal dan eksternal yang akan dilakukan oleh Bappeda harus mempertimbangkan masalah biaya dan resiko yang akan di ambil serta memperhitungkan persiapan materi dan kelemahan-kelemahan factor internal. selanjudnya Bappeda akan menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari pemabangunan. selanjudnya Bappeda akan merumuskan strategi dan rencana serta disajikan dalam dokumen rencana selanjudnya perencanaan dilaksanakan dan diperbaharui.

Dalam melakukan analisis terhadap factor internal Bappeda berpedoman pada ketersediaan dana yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan. hal ini dapat dilihat oleh bappeda dari keadaan dan kondisi keuangan dan kondisi perekonomian pemerintah, apakah kemungkinan dana yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan tersedia. jika keadaan keuangngan pemerintah memungkinkan untuk dilanjudkannya pembangunan yang telah direncanakan maka pembangunan akan dilaksanakan.

Model Perencanaan Strategik Bappeda Kota Padang



4.3. Proses Penyusunan Rencana Kerja di Bappeda

Salah satu faktor yang sangat berperan dalam menentukan pemerintahan yang baik adalah terlaksananya sistem administrasi pemerintahan dengan baik dalam kerangka melakukan pelayanan kepada umum dan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyusunan Rencana Kerja tahun 2009 disusun melalui tahapan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penjangkauan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan daerah 2008 melalui survey prioritas pelayanan masyarakat.
2. Penetapan tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2009 berdasarkan hasil-hasil yang telah dicapai pada 2007-2008 sesuai tahapan RPJMD.
3. Penyiapan draft awal rancangan Rencana Kerja Kota Padang 2009 oleh tim penyusunan RKPD tahun tersebut.
4. Melaksanakan Forum SKPD dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang) Kota Padang tahun 2008 dalam rangka penyusunan draft RKPD tahun 2009.
5. Rencana kerja Bappeda Kota Padang diselaraskan, disinkronisasikan dalam Forum SKPD dan hasil Musrenbang Kota Padang.
6. Menselaraskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang dengan Rencana Kerja Pemerintah Propinsi dan Rencana Kerja Pemerintah, khususnya dalam kegiatan tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang hasilnya untuk pertimbangan penyusunan rancangan awal RKPD Kota Padang.
7. Finalisasi RKPD Pemerintah Kota Padang disusun berdasarkan hasil Musrenbang

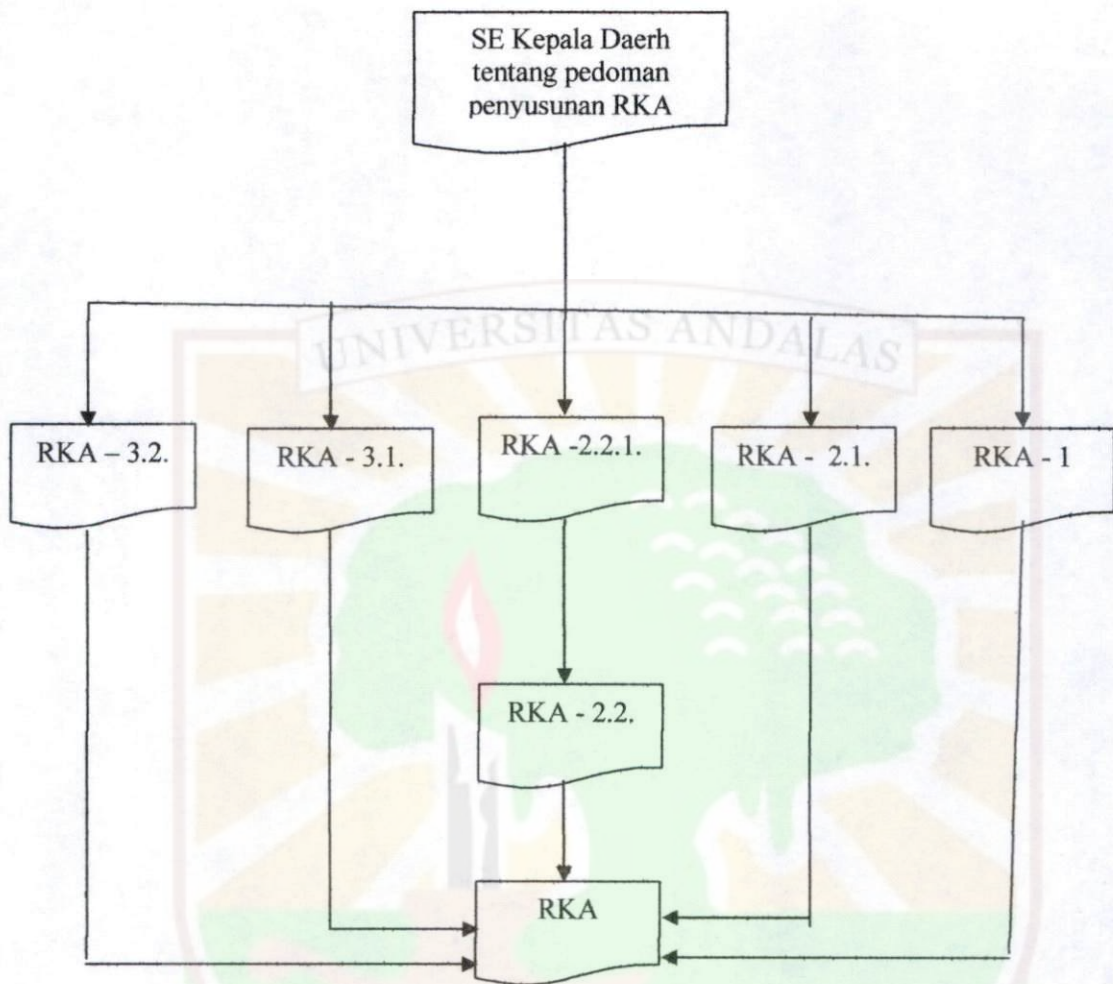
Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Kerja terlebih dahulu ditetapkan rancangan awal Rencana Kerja untuk jangka waktu lima tahun, selanjutnya rencana kerja perangkat daerah tersebut dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan tahunan yang akan menentukan rumusan hasil dan kesepakatan serta komitmen.

4.4. Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran di Bappeda

RKA Bappeda adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan Bappeda serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. RKA Bappeda disusun dengan berpedoman pada Surat Edaran (SE) Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA. Setelah melakukan penyiapan surat edaran kepala daerah tentang penyusunan RKA maka tahapan selanjutnya adalah penyusunan RKA, yaitu :

1. Bappeda menerima Surat Edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA Bappeda berdasarkan surat edaran tersebut, satuan kerja perangkat daerah atau Bappeda mulai menyusun RKA masing-masing.
2. Bappeda menyusun rincian anggaran pendapatan untuk menghasilkan RKA 1. Form RKA 1 tersebut disiapkan hanya oleh Satuan Kerja pemungut pendapatan.
3. Bappeda menyusun rincian anggaran belanja tidak langsung masing-masing kegiatan untuk menghasilkan RKA 2.1.
4. Bappeda menyusun rincian belanja langsung masing-masing kegiatan untuk menghasilkan RKA 2.2.1. untuk kemudian digabung dalam rekapitulasi rincian anggaran belanja langsung untuk menghasilkan RKA 2.2.
5. Bappeda yang bertindak sebagai SKPD menyusun rincian penerimaan pembiayaan daerah untuk menghasilkan RKA 3.1.
6. Bappeda yang bertindak sebagai SKPD menyusun anggaran pengeluaran pembiayaan daerah untuk menghasilkan RKA 3.2.
7. Bappeda mengkomplikasikan dokumen RKA diatas.

Penyusunan RKA Bappeda.



Penyusunan Rencana dan Anggaran di Bappeda dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program, termasuk efisiensi dari pencapaian keluaran dan hasil tersebut. penyusunan anggaran ini dilakukan berdasarkan pencapaian kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

kegiatan tersebut.

Salah satu aspek yang berkaitan dengan kegiatan tersebut adalah bagaimana

menyusun dan mengelola sumber daya manusia yang ada di lingkungan universitas

dan peran serta masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Hal tersebut

perlu diperhatikan karena berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan dari kegiatan

tersebut. Oleh karena itu, dalam kegiatan ini akan dibahas mengenai



Bappeda di dalam melaksanakan pembangunan menggunakan system anggaran berbasis kinerja (*performance Based Badgeting*), yang mana pagu/ anggaran baru akan dibuat setelah kegiatan yang akan dilakukan tersebut ditetapkan. Penetapan anggaran ini berpedoman kepada anggaran-anggaran yang telah dibuat oleh pemerintah pada tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan anggaran pada Bappeda Kota Padang dilaksanakan oleh masing-masing kepala bagian bidang yang kemudian akan meminta persetujuan kepada kepala Pembina utama. Sebelum disetujui terlebih dahulu akan dievaluasi apakah anggaran tersebut apakah telah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.



BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya yang didasarkan atas penelitian yang dilakukan serta perbandingan dengan fakta yang ada di lapangan. Penulis akan mencoba untuk membuat kesimpulan tentang proses penyusunan perencanaan dan penganggaran pada Bappeda Kota Padang.

1. Proses penyusunan Rencana Strategis di Bappeda dilakukan dengan menetapkan isu-isu strategi, serta melakukan analisa faktor internal dan factor internal, karena akan digunakan oleh Bappeda dalam memepertimbangkan biaya dan resiko yang akan di ambil.
2. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan/strategi, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai tugas dan fungsi Beppeda serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Bappeda merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
3. Dalam melakukan penyusuna Rencana Kerja (Renja), terlebih dahulu Bappeda menyiapkan Rencana Kerja Awal untuk jangka waktu lima tahun, selanjudnya Rencana Kerja tersebut di bahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tahunan untuk menentukan rumusan hasil dan komitmen serta kesepakatan.

4. Dalam melakukan penyusunan RKA SKPD Bappeda Kota Padang menggunakan pendekatan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program, termasuk efisiensi dalam pencapaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, dan standar pelayanan nominal.

Namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kota Padang telah melaksanakan fungsi manajemen dengan baik. Dalam melaksanakan penyusunan perencanaan dan penganggaran Bappeda Kota Padang memperhatikan keadaan keuangan pemerintah daerah terlebih dahulu, sehingga akan mengurangi terjadinya kesalahan dan berbagai macam ketimpangan dan kesenjangan dana dalam melaksanakan program-program dan rencana pembangunan yang telah direncanakan.

5.2. saran

Setelah penulis mengadakan penelitian pada Bappeda Kota Padang terhadap peranan informasi akuntansi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, hendaknya Bappeda lebih teliti dalam menetapkan isu-isu strategi yang akan di ambil, supaya dalam melaksanakan perencanaan benar-benar telah sesuai dengan keadaan yang seharusnya terjadi dan terhindar dari masalah-masalah yang mungkin akan terjadi.

2. Dalam membuat dan menyusun anggaran dana dan biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan sebaiknya pemerintah atau Bappeda kota Padang sebaiknya memperhatikan kondisi keuangan dan perekonomian daerah, supaya tidak terjadi ketimpangan di dalam pelaksanaan pembangunan, seperti kurangnya anggaran yang tersedia untuk pembangunan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra Ph.D.,M.B.A.,Akt. 2006“ *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*”, Salemba Empat : Jakarta.
- Halim, Abdul. 2007, “ *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*”, UPP STIM YKPM : Yogyakarta.
- Halim, Damayantil. 2007, “ *Pengelolaan Keuangan Daerah*”, UPP STIM YKPM : Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2004. “ *Akuntansi Sektor Publik* “, Andi Offset : Yogyakarta.
- Nordiawan, Putra, Rahmawati, 2008. “ *Akuntansi Pemerintahan* “, Salemba Empat : Jakarta
- Yuwono, Utomo, Zein, Azrafiyany. 2008. “*APBD dan Permasalahannya*”, Bayumedia Publishing : Malang.

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - SKPD**

Kota Padang
Tahun Anggaran ...

1

Urusan Pemerintahan : X. XX.

Organisasi : X. XX. XX.

Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Penghitungan | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|--------|----------------------|--------|-------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Tarif/Harga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3 x 5) |
| X X X XX XX | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | |

Jumlah

....., tanggal

Kepala Bappeda Kota Padang

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

| No | Nama | Nip | Jabatan | Tandatangan |
|-----|------|-----|---------|-------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| dst | | | | |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Formulir
RKA SKPD
2.1

Kota Padang
Tahun Anggaran ...

Urusan Pemerintahan : X. XX.

Organisasi : X. XX. XX.

Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Tahun n | | | | Tahun n+1 |
|---------------|--------|---------|--------|--------------|-------------|-----------|
| | | volume | satuan | Harga satuan | Jumlah (RP) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3x5) | 7 |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | |

....., tanggal

Kepala Bappeda Kota Padang

(tanda tangan)

(nama lengkap)
NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tandatangan |
|-----|------|-----|---------|-------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| dst | | | | |

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA - SKPD

Kota Padang
Tahun Anggaran

2.2.1

Urusan Pemerintahan: x. xx.

Organisasi : x. xx xx.

Program : x. xx xx. xx.

Kegiatan : x. xx. xx. xx. xx.

Lokasi kegiatan

Jumlah Tahun n-1 Rp (.....)

Jumlah Tahun n Rp (.....)

Jumlah Tahun n+1 Rp (.....)

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

| Indikator | Tolok Ukur Kinerja | Target Kinerja |
|-----------------|--------------------|----------------|
| Capaian Program | | |
| Masukan | | |
| Keluaran | | |
| Hasil | | |

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

| Kode Rekening | Uraian | Rincian Penghitungan | | | Jumlah (Rp) |
|---------------|--------|----------------------|--------|--------------|-------------|
| | | Volume | Satuan | Harga satuan | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3x5) |
| X X X XX XX | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | |
| X X X XX XX | | | | | |
| Jumlah | | | | | |

....., tanggal

Kepala Bappeda Kota Padang

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

2.

Dst

Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

| No | Nama | Nip | Jabatan | Tandatangan |
|-----|------|-----|---------|-------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| dst | | | | |

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA-SKPD**

Kota Padang
Tahun Anggaran ...

2.2

Urusan Pemerintahan : X. XX.

Organisasi : X. XX. XX.

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

| Kode | | Uraian | Lokasi Kegiatan | Target Kinerja (Kuantitatif) | Jumlah | | | | Tahun n+1 |
|---------------|----------|--------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------|---------|-----------|
| Program | Kegiatan | | | | Tahun n | | | | |
| | | | | | Belanja Pegawai | Barang & Jasa | Modal | Jumlah | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=6+7+8 | 10 |
| XX | | Program ... | | | | | | | |
| | XX | Kegiatan | | | | | | | |
| | XX | Kegiatan | | | | | | | |
| | XX | dst | | | | | | | |
| XX | | Program ... | | | | | | | |
| | XX | Kegiatan | | | | | | | |
| | XX | Kegiatan | | | | | | | |
| | XX | dst | | | | | | | |
| XX | | Program ... | | | | | | | |
| | XX | Kegiatan | | | | | | | |
| | XX | Kegiatan | | | | | | | |
| XX | | dst | | | | | | | |
| | XX | dst | | | | | | | |
| Jumlah | | | | | | | | | |

....., tanggal

Kepala Bappeda Kota Padang

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**Formulir
RKA - SKPD**

Kota Padang
Tahun Anggaran

3.2

Urusan Pemerintahan : x. xx.
Organisasi : x. xx. xx.

Rincian Pengeluaran Pembiayaan

| Kode Rekening | Uraian | Jumlah (Rp) |
|----------------------|---------------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| x x x xx xx | | |
| | Jumlah Pengeluaran | |

....., tanggal

Kepala Bappeda Kota Padang

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP.

Keterangan :

Tanggal Pembahasan :

Catatan Hasil Pembahasan :

1.

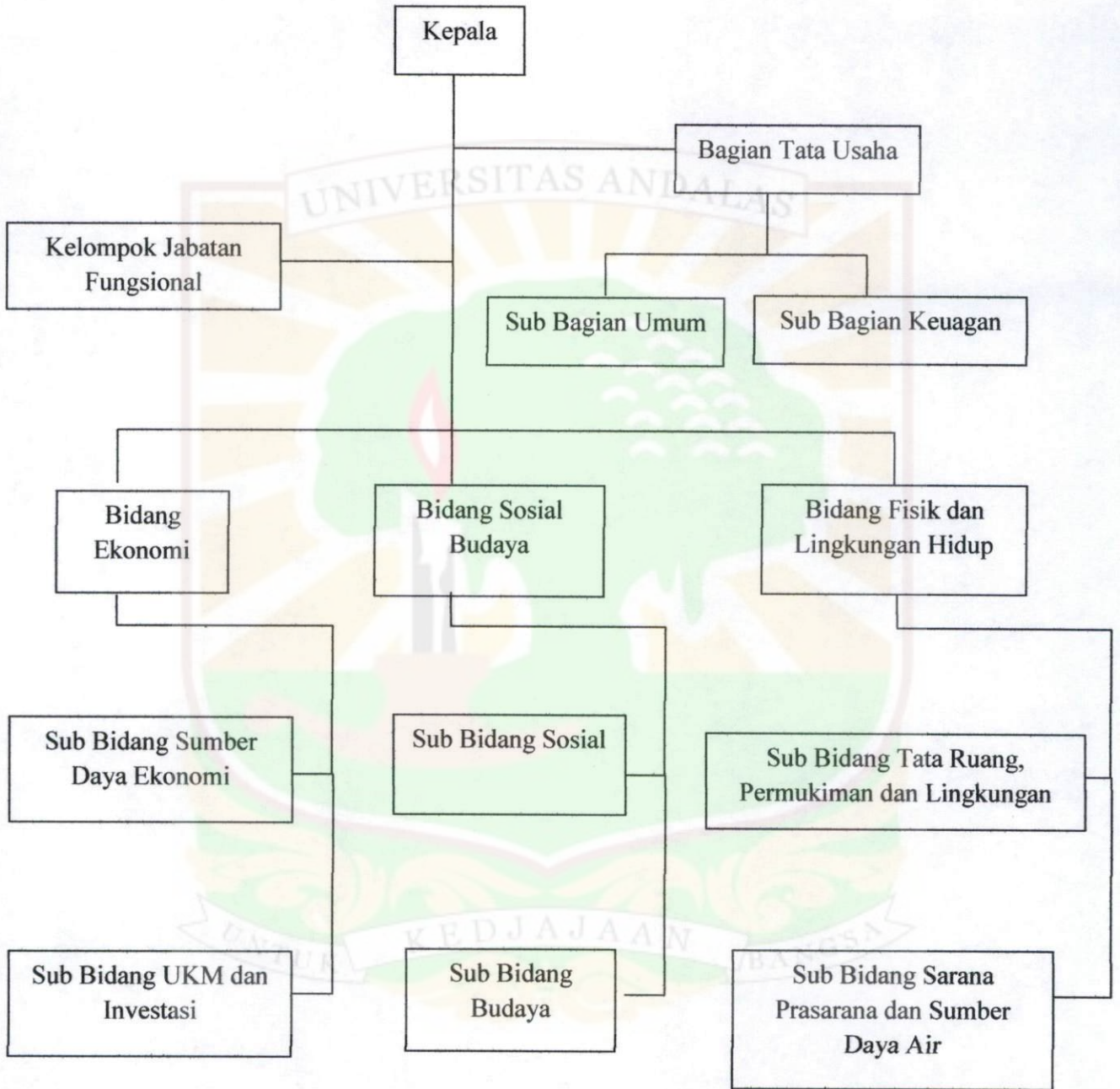
2.

Dst

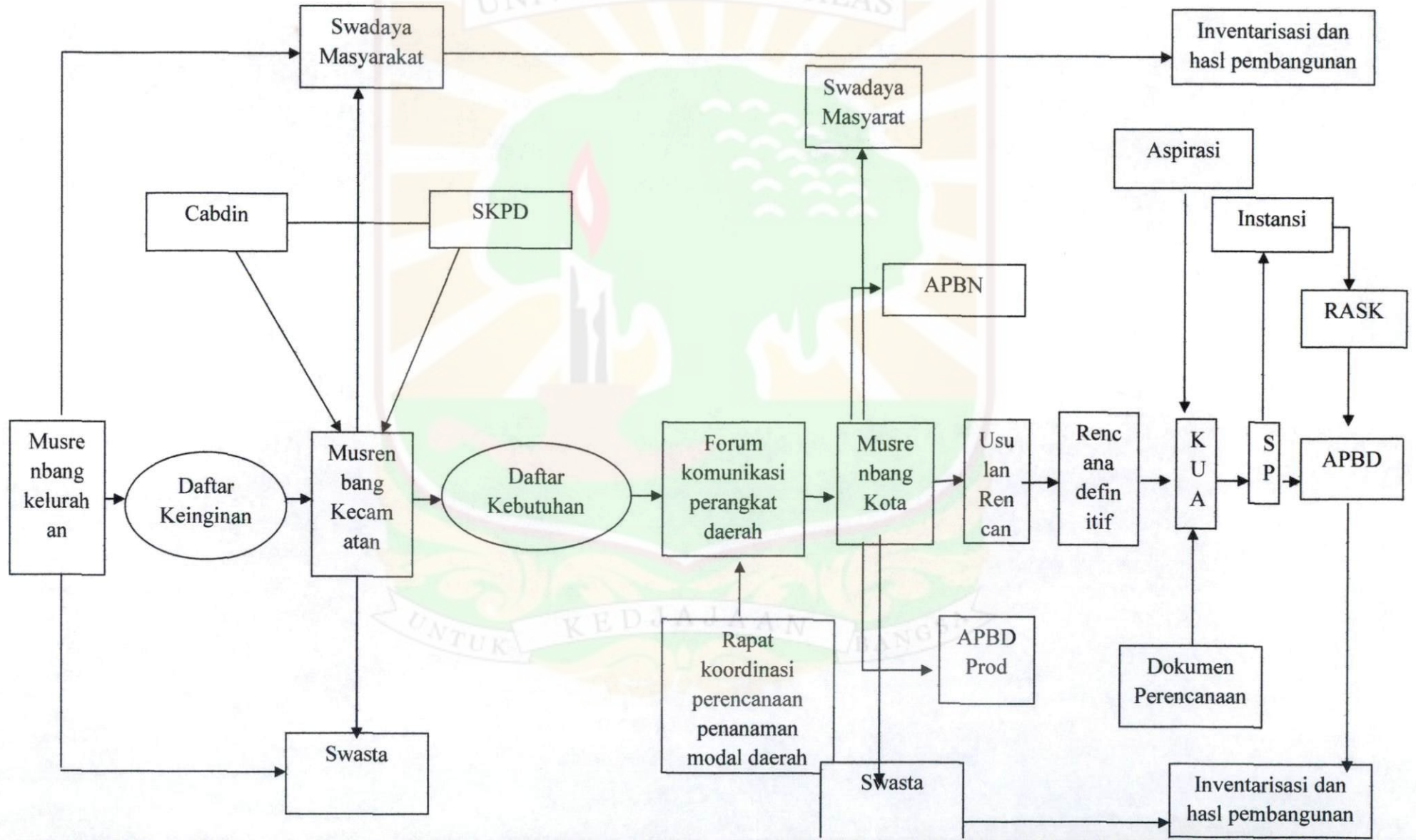
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:

| No | Nama | NIP | Jabatan | Tandatangan |
|-----------|-------------|------------|----------------|--------------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| dst | | | | |

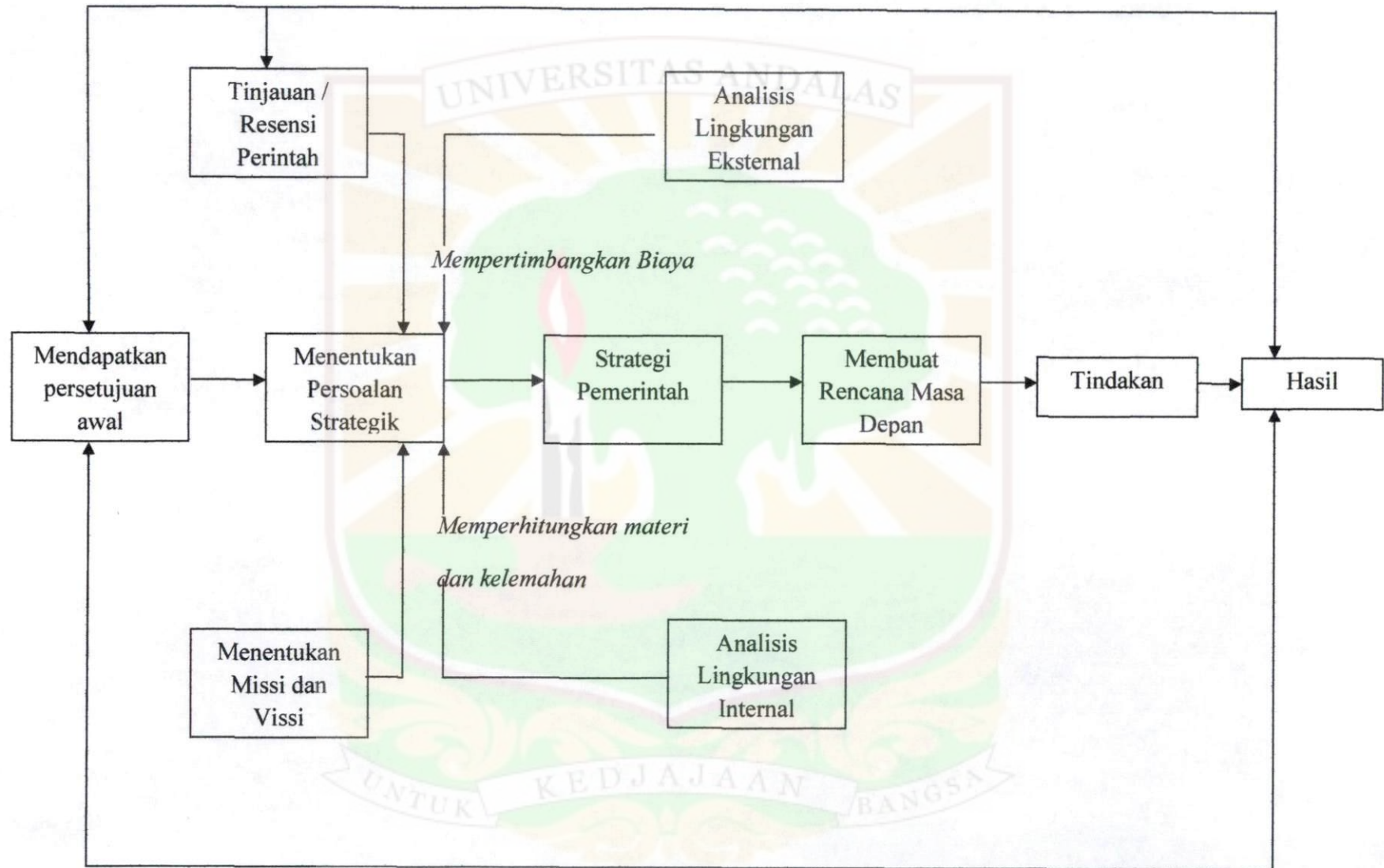
STRUKTUR ORGANISASI



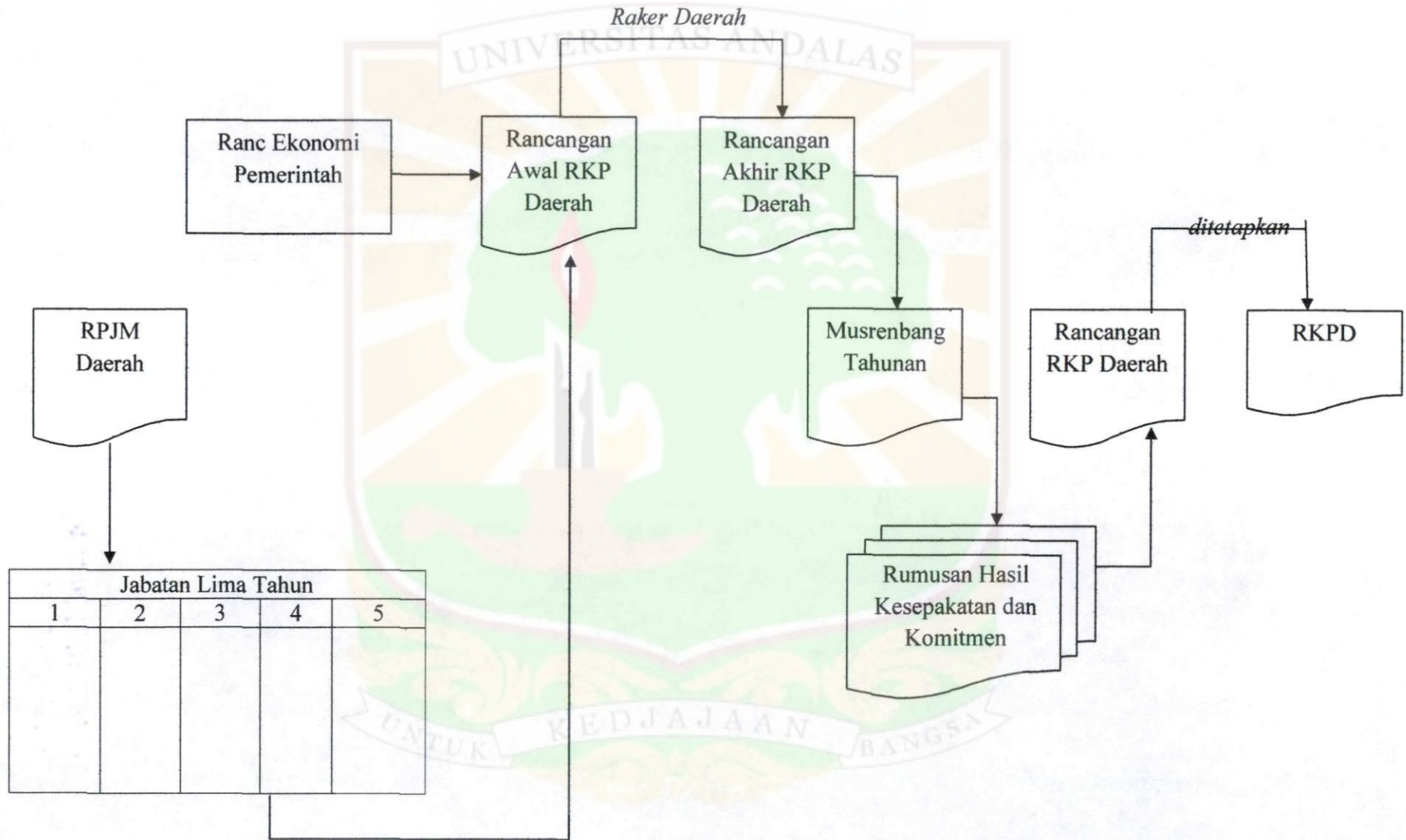
MEKANISME PENYUSUNAN PERENCANAAN



PROSES PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIK DI BAPPEDA KOTA PADANG



PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DI BAPPEDA KOTA PADANG



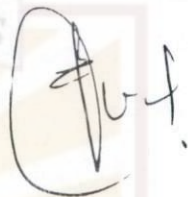


LAPORAN HASIL KEGIATAN MAGANG




PADA BAPPEDA KOTA PADANG


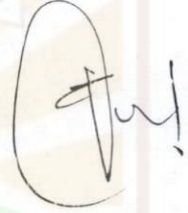


23 MARET – 15 MAI 2009





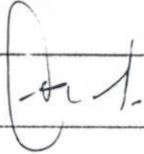
| NO | HARI | TANGGAL | KEGIATAN | TANDA TANGAN |
|----|--------|---------------|--|---|
| 1 | Senin | 23 Maret 2009 | a. Perkenalan di lingkungan Bappeda kota Padang. b. ikut menghadiri acara pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan sekretaris Kota padang di gedung pertemuan Bagindo aziz chan. |  |
| 2 | Selasa | 24 Maret 2009 | a. Izin mengikuti kuliah b. Mempelajari tentang PDRB Kota padang. |  |
| 3 | Rabu | 25 Maret 2009 | a. Apel pagi b. Mempelajari tentang cara pembuatan surat pengadaan barang dan jasa. |  |
| 4 | Kamis | 26 Maret 2009 | Libur hari raya nyepi |  |
| 5 | Jumat | 27 Maret 2009 | a. Mengikuti Pengajian di mesjid Nurul Iman Padang. b. Mempelajari tentang proses |  |


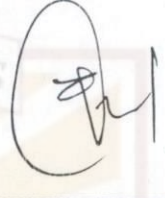


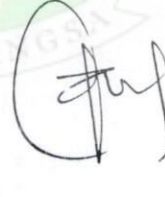

MILIK
 UPT PERPUSTAKAAN
 UNIVERSITAS ANDALAS




| | | | | |
|---|--------|---------------|--|--|
| | | | <p>penyusunan perencanaan.</p> <p>c. Mempelajari cara membuat laporan Neraca dan laporan penyusutan</p> | |
| 6 | Senin | 30 Maret 2009 | <p>a. Apel pagi</p> <p>b. Panitia acara Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di gedung pertemuan Bagindo Aziz Chan Padang</p> |  |
| 7 | Selasa | 31 Maret 2009 | <p>a. Izin mengikuti kuliah</p> <p>b. Panitia acara Musrenbag (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) di gedung pertemuan Bagindo aziz Chan Padang.</p> |  |
| 8 | Rabu | 1 April 2009 | <p>a. Apel pagi</p> <p>b. Mengikuti acara Aanwijzing seleksi langsung penyedia jasa konsultansi pekerjaan penyusunan master plan system penyediaan air minum (SPAM) tahun 2010-2030 Kota Padang.</p> <p>c. Mengikuti acara Aanwijzing seleksi langsung penyedia jasa konsultansi pekerjaan lanjutan penyusunan</p> |  |

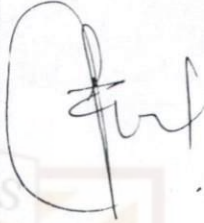



| | | | | |
|----|-------|--------------|--|--|
| | | | kawasan strategis pemukiman nelayan. | |
| 9 | Kamis | 2 April 2009 | <p>a. Apel pagi</p> <p>b. membuat daftar hadir acara pertemuan Aanwijzing seleksi langsung penyedia jasa konsultasi pekerjaan pengembangan wilayah pesisir kota padang.</p> <p>c. Izin mengikuti kuliah</p> <p>d. Membuat darter nama panitia pengadaan barang dan jasa kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi Bappeda kota Padang.</p> |  |
| 10 | Jumat | 3 April 2009 | <p>a. Mengikuti acara pengajian di Mesjid Nurul Iman Padang.</p> <p>b. Membuat daftar tabel kegiatan di Bappeda Kota Padang.</p> |  |
| 11 | Senin | 6 April 2009 | <p>a. Apel pagi</p> <p>b. Mempelajari tentang DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran).</p> <p>c. Mempelajari tentang bagaimana mekanisme penyusunan perencanaan pembangunan.</p> |  |





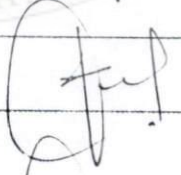

| | | | | |
|----|--------|---------------|---|--|
| 12 | Selasa | 7 April 2009 | <p>a. Apel pagi</p> <p>b. Melakukan kegiatan kelapangan dalam rangka kegiatan alih fungsi lahan pertanian.</p> |  |
| 13 | Rabu | 8 April 2009 | <p>a. Apel pagi</p> <p>b. Membuat susunan panitia pelaksana kegiatan penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian.</p> |  |
| 14 | Kamis | 9 April 2009 | Libur Pemilu | |
| 15 | Jumat | 10 April 2009 | Libur wafatnya yesus | |
| 16 | Senin | 13 April 2009 | <p>a. Apel pagi</p> <p>b. Membuat surat keputusan kepala Bappeda Kota Padang tentang pembentukan panitia pelaksana dan tim pendukung kegiatan fasilitas penunjang investasi dan koordinasi bidang ekonomi Kota padang tahun 2009.</p> |  |
| 17 | Selasa | 14 April 2009 | <p>a. Izin mengikuti kuliah</p> <p>b. Menbuat kerangka acuan kerja penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan pertanian .</p> |  |

| | | | | |
|----|--------|---------------|---|---|
| 18 | Rabu | 15 April 2009 | <p>a. Apel pagi</p> <p>b. Membuat Surat keputusan kepala Bappeda Kota Padang tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan identifikasi dan pemetaan lokasi pemanfaatan air bawah tanah.</p> |  |
| 19 | Kamis | 16 April 2009 | <p>a. Apel pagi</p> <p>b. Izin mengikuti kuliah</p> <p>c. Mempelajari tentang prosedur akuntansi dalam pelaksanaan perencanaan.</p> |  |
| 20 | Jumat | 17 April 2009 | <p>a. Mengikuti acara pengajian di mesjid Nurul Iman Padang.</p> <p>b. Mempelajari tentang prosedur penyusunan perencanaan pembangunan di Bappeda kota Padang.</p> |  |
| 21 | Senin | 20 April 2009 | <p>a. Apel pagi</p> <p>b. Mempelajari tentang Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Bappeda Kota Padang.</p> |  |
| 22 | Selasa | 21 April 2009 | <p>a. Izin mengikuti kuliah</p> |  |

| | | | | |
|----|--------|---------------|--|--|
| | | | b. Membuat RPJM (Rencana Pembangunan jangka Menengah), Kota Padang. |  |
| 23 | Rabu | 22 April 2009 | a. Apel pagi b. Mempelajari tentang bagaimana proses penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Padang. |  |
| 24 | Kamis | 23 April 2009 | a. Apel pagi b. Mempelajari tentang bagaimana proses penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Padang. |  |
| 25 | Jumat | 24 April 2009 | a. Mengikuti acara pengajian di mesjid Nurul Iman Padang. b. Mempelajari tentang bagaimana proses penyusunan perencanaan pembangunan di Kota Padang.. |  |
| 26 | Senin | 27 April 2009 | a. Apel pagi b. Membuat daftar susunan tim pengelol kegiatan penunjang program primtani Kota Padang ta'hun 2009. |  |
| 27 | Selasa | 28 April 2009 | a. Izin mengikuti kuliah b. Membuat daftar tim peaksana kegiatan penyusunan buku |  |

| | | | | |
|----|-------|---------------|---|--|
| | | | kerawanan pangan Kota Padang. | |
| 28 | Rabu | 29 April 2009 | <p>a. Absen pagi</p> <p>b. Membuat laporan hasil lapangan dalam rangka monitoring pelaksanaan program / kegiatan pembangunan tahun 2009.</p> <p>c. membuat laporan susunan tim kegiatan fasilitasi penunjang investasi dan koordinasi bidang ekonomi Kota Padang.</p> |  |
| 29 | Kamis | 30 April 2009 | <p>a. Absen pagi</p> <p>b. Izin mengikuti kuliah</p> <p>c. Membuat daftar susunan panitia pelaksana kegiatan identifikasi dan pemetaan lokasi pemanfaatan air bawah tanah.</p> |  |
| 30 | Jumat | 1 Mai 2009 | <p>a. mengikuti acara pengajian di masjid Nurul Iman Padang</p> <p>b. Membuat daftar susunan panitia pelaksana kegiatan penyusunan desain/master plan pemabangunan ekonomi Kota Padang dan penyusunan perencanaan ekonomi</p> |  |

| | | | | |
|----|--------|------------|--|---|
| | | | masyarakat. | |
| 31 | Senin | 4 Mai 2009 | <p>a. Absen pagi</p> <p>b. membuat daftar lampiran berita acara klarifikasi dan negosiasi pekerjaan penyusunan pekerjaan master plan sistem penyediaan air minum kota Padang.</p> |  |
| 32 | Selasa | 5 Mai 2009 | <p>a. Izin mengikuti kuliah</p> <p>b. Membuat berita acara pembayaran pekerjaan termyn III penyusunan rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) bidang pekerjaan umum / cipta karya Kota Padang.</p> |  |
| 33 | Rabu | 6 Mai 2009 | <p>a. Absen pagi</p> <p>b. Membuat berita acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dengan pemenang seleksi umum jasa konsultasi pekerjaan pelaksanaan master plan SPAM Kota Padang.</p> |  |
| 34 | Kamis | 7 Mai 2009 | <p>a. Absen pagi</p> <p>b. Membuat SK Panitia pengadaan barang dan jasa.</p> |  |

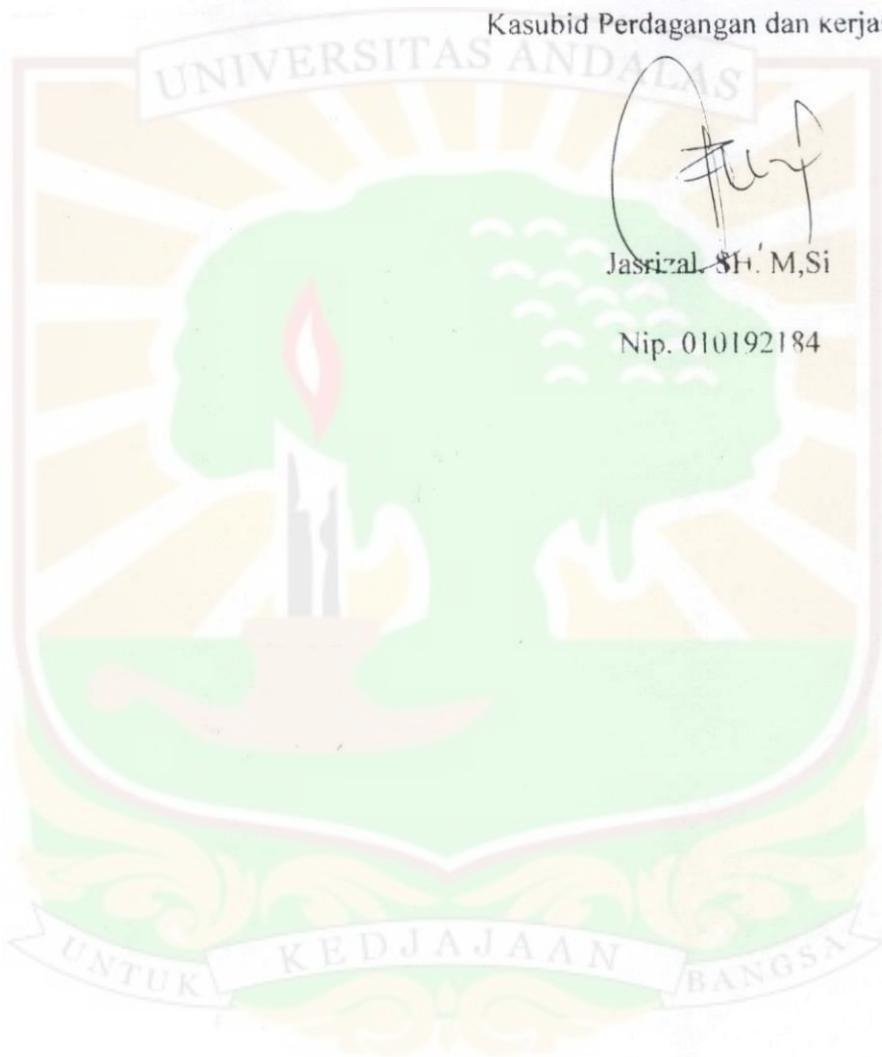
| | | | | |
|----|--------|-------------|---|--|
| 35 | Jumat | 8 Mai 2009 | <p>a. Mengikuti acara pengajian di mesjid Nurul Iman.</p> <p>b. Merekap daftar kwitansi pengeluaran kas di bidang ekonomi.</p> |  |
| 36 | Senin | 11 Mai 2009 | <p>a. Absen pagi</p> <p>b. Membuat daftar nama dari hasil kegiatan ke lapangan dari sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang.</p> |  |
| 37 | Selasa | 12 Mai 2009 | <p>a. Izin mengikuti kuliah</p> <p>b. Mengumpulkan data tentang luas lahan pertanian yang ada di sebelas kecamatan tahun 1998 s/d 2007 dari PDA (Padang dalam angka).</p> |  |
| 38 | Rabu | 13 Mai 2009 | <p>a. Absen pagi</p> <p>b. Merekap daftar luas lahan pertanian dari sebelas kecamatan di kota Padang tahun 2005 s/d tahun 2007 dari Kecamatan dalam angka.</p> |  |
| 39 | Kamis | 14 Mai 2009 | Izin karena sakit. |  |
| 40 | Jumat | 15 Mai 2009 | <p>a. Mengikuti acara pengajian di mesjid nurul iman Padang.</p> <p>b. Membuat laporan hasil kunjungan lapangan dalam rangka monitoring</p> |  |

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|
| | | alih fungsi lahan pertanian tahun | |
|--|--|-----------------------------------|--|

| | | | |
|--|--|-------|--|
| | | 2009. | |
|--|--|-------|--|

Pembimbing Praktek

Kasubid Perdagangan dan kerjasama



Jasrizal

Jasrizal, S.H., M.Si

Nip. 010192184

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

1. Nama : **NISRINA OKTAVIA**
2. Nomor Buku Pokok : 06 052 034
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Balai Tengah, Lintau/ 02 September 1988
5. Warga Negara : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Alamat : Jl. Anggur II No 154 Perumnas Belimbing, Padang
8. Nama Orang Tua : Syafraini
9. Pekerjaan Oran Tua : Wiraswasta
10. Alamat : Alur Tengah, Batu Bulat, Lintau, Tanah Datar

B. PENDIDIKAN FORMAL

1. TK R.A. Al- Ittihad, Alur Tengah (1993-1994)
2. SD Negeri 44 Alur Tengah (1994 - 2000)
3. SLTP Negeri 5 Lintau (2000 - 2003)
4. SMA Negeri 1 Lintau (2003-2006)
5. Program Diploma III Faklta Ekonomi Universitas Andalas Padang (2006-2009)

C. ORGANISASI

1. HIMA Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universita Andalas
2. HIMA Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Padang, Juli 2009

Penulis